

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PERBEDAAN  
SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KETIMPANGAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2022 DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**AULIA RAHMA SAPUTRI  
NPM : 1951010293**

**Prodi : Ekonomi Syariah**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
1444 H/2023 M**

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PERBEDAAN  
SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KETIMPANGAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2022 DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**AULIA RAHMA SAPUTRI  
1951010293**

**Prodi : Ekonomi Syariah**

Pembimbing I: Dr. Budimansyah, S.Th.I, M.Kom.I

Pembimbing II: Gustika Nurmalia, .S.E.I., M.Ek

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pembangunan adalah suatu perubahan mendasar ke arah kondisi yang lebih baik melalui berbagai upaya yang terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan sendiri mengacu pada standar hidup yang relatif terhadap masyarakat. Penyebab ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung juga tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga terjadi pada perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja, investasi yang berbeda-beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, alokasi dana bantuan pembangunan antar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung periode 2017-2022? Apakah Sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung periode 2017-2022? Apakah pengaruh dana perimbangan dan sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi menurut perspektif ekonomi islam? Dan tujuan penelitian ini Mengetahui Dana Perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung periode 2017-2022. Mengetahui apakah Sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung periode 2017-2022. Mengetahui apakah pengaruh dana perimbangan dan sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi menurut perspektif ekonomi islam

Dalam penelitian ini Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari data BPS Provinsi Lampung priode 2017-2022 yang bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur baik secara parsial dan simultan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. Dan sumber daya alam memperoleh tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

**KATA KUNCI:** Dana Perimbangan, Sumber Daya Alam dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

## ABSTRACT

Development is a fundamental change towards better conditions through various planned efforts with the aim of improving the welfare and quality of life of the community. Inequality itself refers to the standard of living relative to society. The causes of inequality between regions in Lampung Province are not only economic growth but also differences in the content of natural resources, human resources, in this case labor, different investments between regions, mobility of goods and services, allocation of development assistance funds between regions, and the concentration of regional economic activities.

The formulation of the research problem is: Does the Balancing Fund have an effect on the inequality of economic development in Lampung Province for the 2017-2022 period? Do natural resources influence the inequality of economic development in Lampung Province for the 2017-2022 period? Does the influence of balancing funds and natural resources have an influence on economic development inequality according to an Islamic economic perspective? And the aim of this research is to find out whether the Balancing Fund influences the inequality of economic development in Lampung Province for the 2017-2022 period. To find out whether natural resources influence the inequality of economic development in Lampung Province for the 2017-2022 period. To find out whether the influence of balancing funds and natural resources has an effect on inequality in economic development according to an Islamic economic perspective

In this research, the research method used is a quantitative descriptive approach. The data used is secondary data originating from BPS data for Lampung Province for the 2017-2022 period which aims to analyze and test the influence of labor, economic growth and infrastructure both partially and simultaneously on economic development inequality.

The data obtained shows that the balancing fund variable has a positive effect on economic development inequality in Lampung Province. And natural resources have no effect on the inequality of economic development in Lampung Province. In the view of the Islamic economic system, the poor distribution of wealth in society is what causes poverty and economic inequality.

**KEYWORDS:** Balancing Funds, Natural Resources and Economic Development Inequality



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Rahma Saputri  
NPM : 1951010293  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Perimbangan Dan Perbedaan Sumber daya Alam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2023

Penulis



**Aulia Rahma Saputri**  
**NPM. 1951010293**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131*

*Telp. (0721) 704030*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Pengaruh Dana Perimbangan Dan Perbedaan Sumber Daya Alam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

**Nama : Aulia Rahma Saputri**

**Npm : 1951010293**

**Prodi : Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.kom**

**NIP. 19770717252002121001**

**Gustika Nurmalia, S.E., M.Ek**

**NIP. 2014090919890708133**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**

**NIP. 198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131  
Telp. (0721) 704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ Pengaruh Dana Perimbangan Dan Perbedaan Sumber Daya Alam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Oleh, Aulia Rahma Saputri,NPM: 1951010293 Program Studi Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jumat, 08 Desember 2023, Waktu: 13.30 – 15.00 WIB. Tempat: Ruang Sidang 5 Prodi MBS.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Mardhiyah Hayati,S.P.,M.S.I** (.....)

**Sekretaris : Agus Kurniawan,S.E.,M.S.Ak** (.....)

**Penguji I : Nur Wahyu Ningsih,S.E.,M.S.Ak,Akt**(.....)

**Penguji II : Gustika Nurmalia,S.E.,M.Ek** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Sutiyanto, S.E., M.M., Akt., C.A**

**Nip. 09700926200811008**



## MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا هُوَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَى الَّذِينَ  
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barang siapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu, dan barang siapa datang dengan (membawa) kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan (seimbang) dengan apa yang telah mereka kerjakan.”*  
**(Q.S. Al-Qasas (28) : 84)**





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua Saya (Bapak Edi Haryono & Ibu Siti Munafiroh) Orang tua yang sangat hebat yang selalu menjadi penyemangat dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan memberikan kasih sayang, cinta dan selalu memberikan motivasi . Terimakasih untuk dukungan moril, materil, dan selalu membersamai saya hingga saat ini dan terimakasih untuk semua perjuangan mamak dan bapak hingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk selalu membersamai dan harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian terbesar di hidup saya, iloveyou more.
2. Kakak dan Adiku (Fanda Venti linda & Annisa salsa billa) yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasehat, dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik semoga Allah SWT memberikan kita kedamaian dan kerukunan sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang sukses dan hebat yang membanggakan kedua orangtua.
3. Teman-Teman kosan ratu (Nadila, Ulfa, Yunita, Juwita) yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi dan selalu membersamai saya dalam penyelesaian skripsi saya.
4. Teruntuk Econ Group moodboster saya ketika penat dalam pengerjaan skripsi saya selalu menjadi rumah paling nyaman untuk kembali pulang semoga kita selalu di berikan kekayaan sehingga goals kita untuk keliling dunia akan segera tercapai, semoga kerukunan dan kekompakan kita akan selalu terjaga hingga maut memisahkan.
5. Untuk teman-teman kelas D jurusan Ekonomi syariah angkatan 2019 terimakasih untuk kebersamaan kita selama 4 tahun dan suka duka cerita kita di bangku perkuliahan semoga kita di beri kesuksesan dan kesehatan hingga bisa bertemu kembali di versi terbaik kita.
6. Teruntuk Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.
7. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Aulia Rahma Saputri dilahirkan di Banjar sari pada tanggal 17 Desember 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Edi Haryono dan Ibu Siti Munafiroh .

Riwayat Pendidikan:

1. Taman Kanak-Kanak RA.ANNISA Banjar sari 2005-2007.
2. MI-AL-MA'-MUR Banjarsari 2007-2013.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Wonosobo 2013-2016.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Semaka 2016-2019.
5. Penulis melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswi, aktif dalam kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 November 2023

Aulia Rahma Saputri  
NPM.1951010293

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT., karena kehendaknya dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Dana Perimbangan Dan Perbedaan Sumber Daya Alam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Tulus Suryanto,S.E.,M.M.,Akt.,C.A.Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Erike Anggraeni,M.E.Sy selaku ketua program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Pembimbing saya Dr.Budimasyah,S.TH.,M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Ibu Gustika Nurmalia,M.Ek. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh Staff dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis.
6. Sahabat-sahabatku yang saya sayangi (Tya, Elin, Sasa, Indah, Mega, Hanifa, Rihla, Dini, Widya, Indri, Diski) yang selalu memberikan semangat,motivasi dan doa dalam penyusunan

skripsi ini.

7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharap adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 13 November 2023

Yang membuat ,

Aulia Rahma Saputri

1951010293





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b>	
A. Dana Perimbangan .....	15
1. Definisi Dana Perimbangan .....	17
2. Komponen-Komponen Dana Perimbangan .....	18
B. Sumber Daya Alam .....	20
1. Definisi Sumber Daya Alam .....	20
2. Klarifikasi Sumber Daya Alam .....	22
3. Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi	

Islam .....	23
C. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi .....	25
1. Definisi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi .....	25
2. Konsep Ketimpangan .....	26
3. Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan .....	28
4. Pengukuran Ketimpangan Pembangunan .....	28
5. Ketimpangan Pembangunan Dalam Ekonomi Islam .....	30
D. Kerangka Pemikiran .....	32
E. Hipotesis .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	37
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data .....	38
1. Populasi .....	38
2. Sampel .....	38
3. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	39
E. Metode Analisis Data .....	41
F. Model Estimasi Regresi Data Panel .....	43
a. <i>Common Effect Model</i> .....	43
b. <i>Fixed Effect Model</i> .....	44
c. <i>Random Effect Model</i> .....	44
G. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel .....	44
a. Uji Chow .....	45
b. Uji Hausman .....	45
H. Uji Hipotesis .....	45
a. Koefisien Determinasi ( <i>R-Squared</i> ) .....	45
b. Uji F .....	46
c. Uji T .....	47

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kondisi Geografis Provinsi Lampung .....	49
B. Profil Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung .....	52

C. Hasil Analisis Data .....	70
1. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Analisis Indeks Williamson) .....	70
2. Dana Perimbangan .....	70
3. Analisis Perbedaan Sumber Daya Alam .....	70
a) <i>Tipologi Klassen</i> .....	70
b) Analisis <i>Location Quotient</i> .....	74
D. Analisis Regresi Panel .....	77
E. Pemilihan Model Regresi .....	83
F. Pengujian Statistik .....	85
G. Pembahasan Data .....	89

## **BAB V PENUTUPAN**

A. Simpulan .....	95
B. Rekomendasi .....	96

## **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. **Tabel 1.1** Kondisi Ketimpangan Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Dengan Indeks Williamson Tahun 2017-2022
2. **Tabel 1.2** Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2022
3. **Tabel 3.1** Definisi Operasional Variabel Independent dan Dependent
4. **Tabel 4.1** Kondisi Geografis Provinsi Lampung
5. **Tabel 4.20** Hasil Perhitungan *Tipologi Klasen* Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022
6. **Tabel 4.21** Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 Analisis *Tipologi Klasen*
7. **Tabel 4.22** Kualifikasi Kuadran *Tipologi Klasen*
8. **Tabel 4.23** Tabel Perhitungan Loction Quotient (LQ) Tahun 2017-2022
9. **Tabel 4.24** Hasil Regresi Data Panel Dengan Metode *Common Effect*
10. **Tabel 4.25** Hasil Regresi Data Panel Dengan Metode *Fixed Effect*
11. **Tabel 4.26** Hasil Regresi Data Panel Dengan Metode *Random Effect*
12. **Tabel 4.27** Hasil Uji Chow
13. **Tabel 4.28** Hasil Uji Hausman
14. **Tabel 4.29** Hasil Uji T
15. **Tabel 4.30** Hasil Uji F
16. **Tabel 4.31** Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )



## DAFTAR GAMBAR

1. **Gambar 1.1** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung
2. **Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran
3. **Gambar 4.1** Peta Administrasi Provinsi Lampung yang Terdiri dari 15 Kabupaten/Kota
4. **Gambar 4.2** Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
5. **Gambar 4.3** Peta Administrasi Lampung Barat
6. **Gambar 4.4** Peta Administrasi Tanggamus
7. **Gambar 4.5** Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan
8. **Gambar 4.6** Peta Administrasi Kabupaten Lampung Timur
9. **Gambar 4.7** Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah
10. **Gambar 4.8** Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara
11. **Gambar 4.9** Peta Administrasi Kabupaten Way Kanan
12. **Gambar 4.10** Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang
13. **Gambar 4.11** Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran
14. **Gambar 4.12** Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu
15. **Gambar 4.13** Peta Administrasi Kabupaten Mesuji
16. **Gambar 4.14** Peta Administrasi Kabupaten Tulng Bawang Barat
17. **Gambar 4.15** Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Barat
18. **Gambar 4.16** Peta Administrasi Kota Bandar Lampung
19. **Gambar 4.17** Peta Administrasi Kota Metro

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi “**Pengaruh Dana Perimbangan Dan Perbedaan Sumber Daya Alam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi D Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul skripsi tersebut maka diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. **Dana perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>1</sup>
2. **Sumber daya alam** adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
3. **Ketimpangan** adalah tidak seimbang, berat sebelah, atau kesenjangan.<sup>2</sup>
4. **Pembangunan Ekonomi** adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan berbagai aspek dalam kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ni Kadek Novia Indrawati Putri and Ni Putu Ayu Darmayanti, “Pengaruh Pad Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali,” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 5 (2019): 2834.

<sup>2</sup> Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan Edisi kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 110.

5. **Antarwilayah (Provinsi Lampung)** adalah adanya kaitan wilayah yang satu dan wilayah yang lain.<sup>4</sup>
6. **Perspektif** adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.<sup>5</sup>
7. **Ekonomi Islam** adalah suatu aplikasi, petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber potensial agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah tentang kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Dalam hal ini terkait dengan ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/Kota dalam kurun waktu 2017-2022 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## B. Latar Belakang

Indonesia yang dikenal sebagai negara berkembang, saat ini masih dalam tahap pembangunan ekonomi, baik pembangunan di tingkat provinsi maupun tingkat wilayah yang ada di Indonesia. Pembangunan ekonomi pada perkembangannya cenderung

---

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Edisi 2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

<sup>4</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), cet.8, h. 79.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*, (Jakarta:Gramedia, 2011), h. 1062.

<sup>6</sup> Aziz Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2008), h. 23.

memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi keseimbangan perekonomian di Indonesia.<sup>7</sup>

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Pembangunan adalah suatu perubahan mendasar ke arah kondisi yang lebih baik melalui berbagai upaya yang terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*).

Ketimpangan sendiri mengacu pada standar hidup yang relatif terhadap masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor anugerah awal. Perbedaan tersebut yang membuat tingkat pembangunan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sehingga menimbulkan GAP atau jurang kesejahteraan di wilayah tersebut. Dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat terlihat dari tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Kedua aspek tersebut harus dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi.<sup>8</sup>

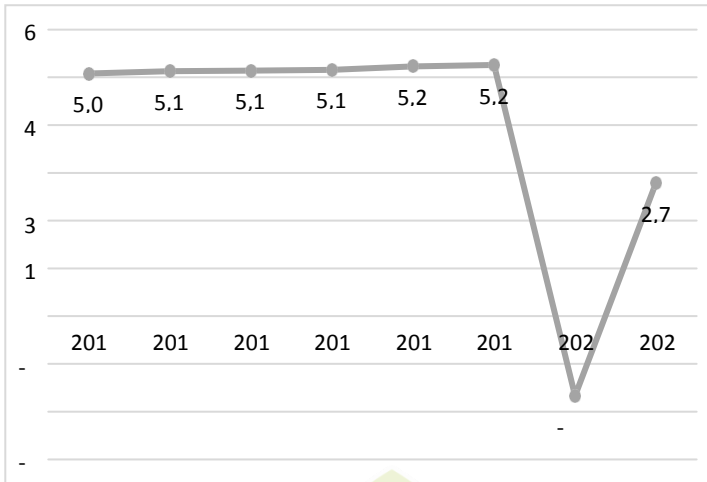
Sedangkan pada umumnya pembangunan daerah akan difokuskan pada pembangunan ekonomi. Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan membaiknya taraf hidup sasaran yang dicapai pada umumnya adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDRB jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

---

<sup>7</sup> Sahya Anggara and Ii Sumantri, "Administrasi Pembangunan: Teori Dan Praktik" (2016).

<sup>8</sup> Siswoyo Hari Santosa, "Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur," *Media Trend* 10, no. 2 (2015): 138–155.





Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

### Gambar 1.1

#### Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung (Persen)

Dari Gambar 1.1 diatas ditunjukkan bahwa Provinsi Lampung dalam 8 tahun terakhir nilai laju pertumbuhan PDRB nya cenderung fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan, faktor tersebutlah yang menyebabkan ketimpangan terjadi di wilayah tersebut. Kemudian jika dilihat dari nilai PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, akan sangat terlihat disparitas yang terjadi di setiap kabupatennya.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah serta mendorong dan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah demi kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Perimbangan</b>
2017	4.028.319.626
2018	4.207.157.805
2019	2.627.195.350
2020	2.461.886.210
2021	4.184.392.482
2022	3.224.336.095
<b>Total</b>	<b>20.733.287.568</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2023, diolah*

Pada tabel diatas,dapat dilihat selama tahun 2017-2022, dana perimbangan menurun. Penurunan nilai ini menggambarkan bahwa dana perimbangan dapat menurunkan ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ketimpangan wilayah yang terjadi di lampung ini disebabkan karena perbedaan karakteristik wilayah. Disamping itu terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketimpangan di suatu wilayah melalui dana perimbangan.

Penyebab ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung juga tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga terjadi diantaranya adalah perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja, investasi yang berbeda-beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, alokasi dana bantuan pembangunan anatar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.

**Tabel 1.2****Kondisi Ketimpangan Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dengan Indeks Williamson Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>IW</b>	<b>Perubahan</b>
2017	0,236689619	
2018	0,237756117	0,450588926
2019	0,237369614	-0,162562668
2020	0,213394726	-10,10023447
2021	0,212194991	-0,562214247
2022	0,217865616	-0,465423514

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2023, diolah*

Pada tabel diatas,dapat dilihat selama tahun 2017-2022, indeks ketimpangan Williamson menurun. Penurunan nilai indeks Williamson ini menggambarkan penurunan ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ketimpangan wilayah yang terjadi di lampung ini disebabkan karena perbedaan karakteristik wilayah-wilayah tersebut. Disamping itu terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketimpangan di suatu wilayah.

Isu terkait dengan ketersediaan dan perbedaan sumber daya alam ini bukanlah hal yang baru. Sejak abad ke 18, Thomas Malthus dalam tulisannya "*Essay in the Principle of Population*" telah mengemukakan isu ketersediaan sumber daya alam ini, di mana perkembangan penduduk pada akhirnya akan melampaui ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung kecukupan manusia. Meski teori Malthus ini dianggap sebagai teori pesimis dan belakangan kemudian dapat diatasi dengan rekayasa ilmu pengetahuan, namun masalah ketersediaan dan kelangkaan sumber daya alam ini terus menjadi fokus utama dalam setiap

pembangunan ekonomi diantar wilayah.<sup>9</sup>

Peran dan kontribusi sumber daya alam dalam perekonomian dan kehidupan manusia merupakan salah satu konsep dasar sumber daya alam sebagai “modal alam” atau “*natural capital*”. Provinsi Lampung terdiri atas 15 Kabupaten/Kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap Kabupaten/Kota. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan, dimana seharusnya kekayaan alam menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan pada nilai tambah tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh wilayah di Provinsi Lampung secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.

Dalam Ekonomi Islam, juga membahas sebuah konsep pembangunan Syari’ah dimana konsep tersebut diartikan sebagai konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>10</sup> Pembangunan ekonomi disuatu daerah atau wilayah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan.

Pandangan Ekonomi Islam mengenai situasi perekonomian yang dibentuk oleh nilai-nilai dan prinsip Islam, yaitu perekonomian harus menciptakan keadilan dan harmonis.<sup>11</sup> Keadaan ini bisa dicerminkan dengan adanya kesempatan pada setiap individu untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh dan proposional dan adanya iklim yang sinergis antar anggota masyarakat untuk saling mendukung (harmonis) agar terciptanya

---

<sup>9</sup> A Fauzi, “Peran Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan” (2010).

<sup>10</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, “Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi,” *Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan ke-1* (2016).

<sup>11</sup> Ibid.

kesejahteraan (falah). Maka dari itu, pembangunan ekonomi bisa berhasil dengan adanya kerja keras dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana tentang anjuran untuk bekerjadalama kegiatan perekonomian disebutkan dalam Al-Qur'an (QS.AtTaubah: 105):

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Dalam Ayat diatas, memerintah kepada semua orang mukmin dan setiap orang untuk berusaha, termasuk usaha ekonomi. Dimana setiap kegiatan ekonomi tersebut pasti akan diketahui oleh Allah SWT, Rasulullah, dan orang-orang beriman secara keseluruhan. Dalam setiap usaha ekonomi yang kita lakukan pasti akan ada balasannya atau hasilnya dan yang berhak memberikan pembalasan atau imbalan itu adalah Allah SWT, Dzat yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib disamping hal-hal yang tampak. Dan Allah SWT akan memperlihatkan atau menampilkan setiap perbuatan seseorang baik maupun buruk di akhirat kelak. Maka lakukanlah usaha kegiatan ekonomi secara syariah yaitu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Dana Perimbangan Dan Sumber Daya Alam terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022)**".

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terbatas pada dana perimbangan dan sumber daya alam terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Lampung. Dan dokumentasi dalam penelitian ini adalah menganalisis data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berkaitan erat dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung periode 2017-2022?
2. Apakah Sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung periode 2017-2022?
3. Apakah pengaruh dana perimbangan dan sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi menurut perspektif ekonomi islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Dana Perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung periode 2017-2022.
2. Mengetahui apakah Sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung periode 2017-2022

3. Mengetahui apakah pengaruh dana perimbangan dan sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi menurut perspektif ekonomi islam

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian Dari uraian tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk peneliti, sebagai penambah ilmu dan pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian juga dapat menjadi salah satu referensi dalam proses pembelajaran menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan.
2. Untuk penelitian kedepannya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.
3. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah yang ada di Pulau Sumatera, dalam penyusunan strategi dalam mengatasi ketimpangan pembangunan melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Dana Perimbangan

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penelitian ini kajian terdahulu berfungsi untuk memberikan peneliti mengenai gambaran yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis dan pernah dilakukan oleh penelitian oleh penelitian terdahulu. Serta untuk membandingkan adanya kesamaan dan perbedaan antara peneliti yang dilakukan dengan peneliti-peneliti terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Dodi Chandra, Syurya Hidayat, Rosmeli (2017) tentang “Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi” Analisis dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis



regresi. Dan hasil analisis menemukan bahwa: rata-rata dana perimbangan yang diperoleh Provinsi Jambi selama Tahun 2001-2013 adalah sebesar Rp 3.854.250.067, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama Tahun 2001-2013 sebesar 6,64 % pertahun. Selanjutnya rata-rata tingkat ketimpangan antar daerah adalah sebesar 0,38, yang terkategori sedang; Dana perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Namun demikian, dana perimbangan juga berdampak buruk terhadap peningkatan ketimpangan antar daerah.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal, Amzul Rifin, Bambang Juanda dengan judul “Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Provinsi Aceh” penelitian ini adalah menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah dan menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson dan Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang signifikan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Aceh adalah variabel listrik yang berpengaruh sebesar -0,012594 dan variabel pendidikan yang berpengaruh sebesar -0,060347. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah jalan berpengaruh sebesar -0,009463 dan variabel kesehatan berpengaruh sebesar 0,046067.<sup>13</sup>
3. Penelitian yang dilakukan Mario Andiaskiton (2019) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara”. Metode penelitian empiris ini

---

<sup>12</sup> Dodi Chandra, Syurya Hidayat, and Rosmeli Rosmeli, “Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Daerah Di Provinsi Jambi,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 12, no. 2 (2017): 67–76.

<sup>13</sup> Rismanto Irawan and Deden Dinar Iskandar, “Analysis Of Infrastructure Effect On Indonesia’s Economic Growth Year 2007-2014,” *AFEBI Economic and Finance Review* 4, no. 2 (2019): 121–130.

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif menggunakan estimasi model efek tetap (*Fixed Effect Model*) untuk melihat hubungan variabel bebas pada ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan: (i) bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan. (ii) bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan. (iii) bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, (iv) bahwa variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, (v) dari hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel investasi, angkatan kerja, dana perimbangan, dan aglomerasi yang diteliti benar dapat mempengaruhi ketimpangan sebesar 87.15 persen, sedangkan 12.85 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model (yang tidak diteliti).<sup>14</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zul Hazmi Alfurqani<sup>1</sup>, Dwi Widiarsih, Jeki Algusri (2021) dengan judul penelitian "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau". Dengan hasil penelitian bahwa Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pada awalnya oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mario Andiaskiton, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Smart* 3, no. 2 (2019): 68–80.

<sup>15</sup> Zul Hazmi Alfurqani, Dwi Widiarsih, and Jeki Algusri, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan

5. Penelitian yang dilakukan oleh Prio Prasojo (2022) dengan judul “Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung: Ekonomi dan Regional (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2021”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung tahun 2014-2021 masih tergolong rendah dan cenderung menurun setiap tahunnya dengan rerata nilai sebesar 0,2, dimana ketimpangan tersebut disebabkan oleh kontribusi positif dari Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, dan Kota Bandar Lampung. Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor unggulan atau pendorong pembangunan di Provinsi Lampung terbesar dengan rerata nilai sebesar 1,24. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan, dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Lampung. Rekomendasi strategi dalam mengurangi ketimpangan adalah dengan menurunkan kemiskinan, memberikan peluang pekerjaan, menurunkan ketimpangan kekayaan, menguatkan industri berbasis rakyat.<sup>16</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian ini yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan dan Perbedaan Sumber Daya Alam terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam

---

Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau,” *Economics, Accounting and Business Journal* 1, no. 1 (2021): 295–307.

<sup>16</sup> Prasojo Prio, “Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Lampung: Ekonomi Dan Regional (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2021” (2016): 1–23.

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

**BAB II : Landasan Teori Dan Pengujian Hipotesis**

Berisi uraian tentang teori, penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan pengujian hipotesis.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisikan uraian metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan penarikan sampel, variable penelitian, definisi operasional variabel, Teknik pengumpulan data, Instrument penelitian, Teknik analisis data.

**BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisikan deskripsi karakteristik responden penyajian data, serta analisis data.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

#### **A. Teori Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi merupakan salah satu alat/bahan untuk mencapai suatu tujuan bernegara, yang paling utama yaitu memberikan sebuah pelayanan publik yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan menciptakan suatu proses untuk pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Pelaksanaan desentralisasi secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 yang mana proses ini diawali dengan pengesahannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD). Perbaikan yang terjadi pada saat ini yaitu Undang-Undang No 33 Tahun 2004. Meskipun begitu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, hanya desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan wilayah. Desentralisasi dapat memberikan pelimpahan wewenang terhadap tingkatan pemerintah yang lebih rendah yaitu pemerintah daerah untuk melakukan belanja, wewenang untuk memungut pajak, adanya dewan dan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, mendapatkan bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

---

<sup>17</sup> Ali Abdul Wakhid and A A W M SiAg, "Buku Administrasi Dan Pembangunan Nasional Oleh Dr. Ali Abdul Wakhid, S. Ag., M. Si" (Harakindo Publishing, Sukarame Bandar Lampung, 2016).

Desentralisasi terjadi di berbagai negara di dunia yaitu terutama negara-negara berkembang yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: latar belakang dan pengalaman suatu negara, peran negara dalam globalisasi dunia, kemunduran yang terjadi dalam pembangunan ekonomi, tuntutan perubahan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi, tanda-tanda adanya kekacauan atau disintegrasi di suatu negara, dan respon banyaknya terjadi kegagalan yang dialami oleh pemerintah sentralisasi dalam memberikan suatu layanan terhadap masyarakat yang kurang efektif. Pada prinsipnya desentralisasi bertujuan untuk mengefisienkan sektor publik dalam pelayanan dan produksi, meningkatkan akuntabilitas dan respon terhadap kebutuhan serta kondisi lokal, hal ini yang mendorong desentralisasi dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 desentralisasi adalah suatu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun banyak keuntungan yang didapat dari desentralisasi fiskal namun jika tidak disertai dengan peningkatan keahlian aparatur pemerintah yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tingkat akuntabilitas yang lebih baik, maka desentralisasi fiskal dapat menyebabkan suatu masalah untuk pemerintah seperti korupsi dan pelayanan publik yang buruk.

Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan melakukan tugasnya secara mandiri. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mencari sumber pendapatan suatu daerah dan pemerintah daerah diberikan dana transfer dari pemerintah untuk membuat suatu daerah mengelola keuangannya sendiri. Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur menggunakan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektifitas.

## 1. Dana Perimbangan

### a. Definisi Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBD yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendapatan pemerintah antar-daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.<sup>19</sup>

Menurut Nordiawan, dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak Pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya<sup>20</sup>

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh irfan erdiansyah, dkk menyebutkan dalam jurnalnya

---

<sup>18</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Penerbit Erlangga, 2014).

<sup>19</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang,” *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* (2004).

<sup>20</sup> Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, and Efda Kristinawati, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur,” *Jurnal Aplikasi Bisnis* (2017): 43–59.



bahwa Dana Perimbangan, adalah transfer dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian daerah menjalani fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.<sup>21</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

## **b. Komponen-komponen Dana Perimbangan**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, jenis-jenis Dana Perimbangan terdiri atas:

### **1. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>22</sup>

Sumber-sumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dibagi menjadi beberapa macam amantara lain:

---

<sup>21</sup> Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, and EKAWATI EKAWATI, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)," *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2019): 85–94.

<sup>22</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang."

- a) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:
  - 1) Pajak bumi dan bangunan (PBB)
  - 2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
  - 3) Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21
- b) Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari:

- 1) Kehutanan
- 2) Pertambangan umum
- 3) Perikanan 4)
- 4) Pertambangan minyak bumi
- 5) Pertambangan gas bumi dan
- 6) Pertambangan panas bumi

## **2. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari

DAU.<sup>23</sup>

### c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

- 1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum,
- 2) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir atau kepulauan dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai
- 3) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan
- 4) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.<sup>24</sup>

## B. Sumber Daya Alam

### 1. Definisi Sumber Daya Alam

Teori pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh Robert Malthus bahwa, untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau-tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup>Dico primadha Santosa, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung)” (2022).

dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat di kelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam yang bersifat terbatas.<sup>25</sup>

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai moneter. Sumber Daya Alam (SDA) adalah faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan kita. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya bergantung pada aktivitas manusia. Sumber daya alam mencakup semua aspek lingkungan alam kita (biji-bijian, pohon, tanah, air, udara, matahari, dan sungai).<sup>26</sup>

Sumber daya alam adalah unsur yang meliputi sumber daya alam tumbuhan (tumbuhan) dan sumber daya alam hewan (hewan) serta unsur nonhayati yang membentuk suatu ekosistem secara keseluruhan. Sumber daya alam memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut definisi sumber daya alam dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan nonhayati yang bersama-sama membentuk satu kesatuan ekosistem.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 3.

<sup>26</sup> Jeffrey Hunker and Christian W Probst, "Insiders and Insider Threats-An Overview of Definitions and Mitigation Techniques.," *J. Wirel. Mob. Networks Ubiquitous Comput. Dependable Appl.* 2, no. 1 (2011): 4–27.

<sup>27</sup> Anggi yulanda Agustria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyash Sya'iyah (Studi Di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

## 2. Klasifikasi Sumber Daya Alam

Ada berbagai sudut pandang tentang bagaimana sumber daya alam harus didistribusikan. Ekosistem dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan sifat umumnya, yaitu sumber daya alam terestrial (darat) dan sumber daya alam perairan (air). Namun demikian, dalam pengelolaan sumber daya alam, secara umum ada tiga jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu:

- 1) Sumber daya alam yang dapat diperoleh kembali (renewable resources), dimana aliran sumber daya bergantung pada pengelolaan, dengan kemungkinan pasokannya akan berkurang, mempertahankan, atau meningkatkan. Contoh tanah, hutan, dan satwa liar.
- 2) Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (non-renewable atau deposit resources), yang persediaannya tetap, dan sumber daya alam tersebut meliputi:
  - a) Persediaan akan benar-benar habis secara fisik. Batubara, minyak, dan gas alam adalah beberapa contohnya.
  - b) Persediaan habis, tetapi dapat digunakan kembali (daur ulang). Sebagai contoh
- 3) Sumber daya alam yang tidak akan habis (continuous or flow resources) dan tersedia tanpa batas waktu meliputi:
  - a) Persediaan yang tidak terbatas yang tidak terpengaruh oleh perbuatan manusia. Energi matahari dan energi pasang surut adalah dua contoh.
  - b) Memiliki persediaan yang tidak terbatas, tetapi dipengaruhi oleh tindakan manusia. Lanskap, keindahan alam, ruang, dan udara adalah beberapa contohnya. Ketika sumber daya alam digunakan untuk pembangunan, selalu ada perubahan ekosistem yang berdampak positif (manfaat) atau negatif (risiko) bagi manusia. Semakin besar manfaat yang dicari, semakin besar pula risiko yang ada atau

munculnya risiko baru. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman, dan manusiawi. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih diuntungkan daripada risiko terhadap lingkungan. Lebih khusus lagi, pengelolaan sumber daya alam mencakup dua konsep berikut:

- i. Upaya manusia untuk mengubah ekosistem sumber daya alam untuk memperoleh manfaat yang maksimal dan jangka panjang.
- ii. Proses pengalokasian sumber daya alam dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap berusaha menyeimbangkan populasi dan sumber daya manusia dan mencegah penipisan sumber daya alam (dan lingkungan). Dengan demikian, ruang lingkup sumber daya alam adalah daftar perencanaan, pelaksanaan/pemanfaatan, dan pengendalian/pengawasan. Pada dasarnya, hanya sumber daya alam terbarukan yang dikelola.<sup>28</sup>

### 3. Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sumber daya alam (Resources) adalah sumber persediaan, baik sebagai candaan maupun yang baru. Dari sudut pandang ekonomi, sumber daya merupakan input dalam suatu proses produksi. Sumber daya juga diartikan sebagai suatu atribut atau unsur dari lingkungan yang mempunyai nilai dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh keadaan sosial budaya,

---

<sup>28</sup> Salwa Fadhilah Haya and Khairina Tambunan, "Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kota Medan," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 129–38.

ekonomi, teknologi, dan kelembagaan.<sup>29</sup>

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan<sup>30</sup>

Memanfaatkan sumber daya alam jika dilakukan dengan benar tanpa membuat kerusakan adalah ibadah sebagai manifestasi atas perintah Allah kepada manusia untuk berusaha mencari rizki guna memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera. Aktivitas ini tidak boleh dilakukan secara eksploitatif, hanya menguras sumberdaya alam dan mencemari lingkungan, sebab akan menimbulkan kerusakan pada ekologi. Etika pengelolaan lingkungan dalam Islam adalah mencari keselarasan alam sehingga manusia tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri,tetapi tetap menjaga lingkungan dari kerusakan. Larangan dalam berlebihan juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 31 yang Berbunyi :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya:”Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S Al-Araf : 31)

<sup>29</sup> Muh Saad, Ayu Rukayyah Yunus, and Muslihati Muslihati, “Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 131–146.

<sup>30</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16



Substansi ayat-ayat di atas adalah perlunya pemakain harta secara wajar, tidak kikir dan tidak boros. Ini dapat dilihat dengan penggunaan term *tabdzîr* yang disebut sebagai *ikhwân al-Syayâthîn* (teman-teman syetan) dan term *isrâf*. Sementara itu Muhammad Rasyîd Ridhâ menyatakan bahwa sikap *iqtishâd* dan *i'tidâl* (ekonomis/ hemat dan moderat/ sederhana) adalah salah satu sikap Islam terhadap harta benda, sebagaimana juga pandangannya terhadap pelbagai problem lain.<sup>31</sup> Yang dimaksud berlebihan dalam ayat ini tidak hanya pada makan dan minuman saja, tetapi dalam segala hal termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Alam dimanfaatkan seperlunya saja, karena itu eksploitasi besar-besaran terhadap alam yang mengakibatkan rusaknya habitat alam dilarang keras oleh Islam

## C. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

### 1. Definisi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

ketimpangan antar wilayah dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut dikenal sebagai hipotesa Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung mengalami peningkatan terus-menerus.<sup>32</sup>

Ketimpangan menggambarkan kondisi yang kontras antara wilayah satu dengan wilayah lainnya seperti perbedaan kontras terkait terpusatnya konsentrasi kegiatan ekonomi pada daerah tertentu. Perbedaan yang kontras

---

<sup>31</sup> Imam Muhammad Rasyid, "Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyur Bi Tafsir Al-Manar Jilid 1" (2016).

<sup>32</sup> Muhammad Hidayat and Sitti Rahayu, "Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau; Pendekatan Regresi Kuadratik," *AGREGATE 1*, no. 1 (2018): 14–22.

menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan antara daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi dan tidak.<sup>33</sup>

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi ketimpangan. Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.<sup>34</sup>

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari sisi vertikal maupun horizontal. Adanya ketimpangan pembangunan vertikal dapat dilihat dari perbedaan distribusi pendapatan. Sementara ketimpangan pembangunan secara horizontal, dapat dilihat dari adanya negara maju dan terbelakang.<sup>35</sup>

## 2. Konsep Ketimpangan

Kuznets mengungkapkan bahwa pada proses awal pertumbuhan ekonomi di negara miskin cenderung menyebabkan terjadinya kemiskinan yang meningkat dan juga membuat ketimpangan dalam pendapatan semakin tidak merata. Kemudian setelah negara tersebut mengalami kemajuan akan membuat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin menurun.

Pada tahap awal ketimpangan pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian mengalami

---

<sup>33</sup> ALFIRA RAMA NOVA, “Analisis Atas Ketimpangan Pembangunan Dan Pengujian Hipotesis Kuznet Di Provinsi Banten Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19” (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

<sup>34</sup> Hartono Budiantoro, “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah,” *Semarang: Universitas Diponegoro* (2008).

<sup>35</sup> Bakri Bakri, Syafrizal Syafrizal, and Hasdi Aimon, “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Dan Kebijakan Penanggulannya,” *Jurnal Kajian Ekonomi* 4, no. 7 (2016).

peningkatan dengan cepat namun sebelum kemudian mengalami penyusutan. Ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi pada daerah dengan sektor industri modern daripada suatu daerah yang menggunakan sektor pertanian yang relatif tetap. Kuznet juga mengungkapkan bahwa ketimpangan dalam pendapatan ditahap awal cenderung semakin meningkat karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang cukup besar dalam pendistribusian pendapatan, kemudian setelah tahap pembangunan berikutnya ketimpangan pendapatan cenderung menurun karena distribusi pendapatan sudah lebih merata. Permasalahan dalam pembangunan antar daerah ini diakibatkan adanya sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang berbeda di setiap daerah sehingga proses pembangunan di setiap daerah juga mengalami perbedaan yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah.

Menurut (Sukirno, 2006) distribusi pendapatan terdapat dua yaitu distribusi pendapatan relatif yang merupakan perbandingan antara total pendapatan yang sudah diterima oleh sekelompok penerima pendapatan tersebut, sedangkan distribusi pendapatan mutlak merupakan persentase masyarakat yang mendapatkan pendapatan yang mencapai pendapatan yang tertentu ataupun kurang dari padanya. Pemetaan dalam distribusi pendapatandalam distribusi pendapatan ada tiga kategori yaitu pembagian distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pebagian distribusi pendapatan antardaerah desa dan kota, serta pembagian distribusi pendapatan antar wilayah kabupaten/kota.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Lestari Widia, "Ketimpangan Pembangunan Di Nagari Berprestasi (Studi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Jorong Koto Tuo, Nagari Simarasok, Kec. Baso, Kab. Agam)" (Universitas Andalas, 2013).

### 3. Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan

Adapun faktor-faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan antarwilayah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah serta alokasi investasi antarwilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Oleh karena itu, untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan metode yaitu Indeks Williamson.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antarwilayah. “Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil” (Todaro, 2004). Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketimpangan pembangunan merupakan suatu kesenjangan atau keadaan yang tidak adil yang disebabkan karena ketidakmerataan pembangunan pada suatu wilayah.<sup>37</sup>

### 4. Pengukuran Ketimpangan Pembangunan

Pengukuran ketimpangan dapat diukur dengan beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Dewanto And Rahmawati, “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah ( Studi Di Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia ) Tahun 2014-.”

- 1) Indeks Williamson. Indeks Williamson ini merupakan salah satu alat yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks ini digunakan oleh Jeffrey G. Williamson saat 29 meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan pada tingkat regional suatu negara.
- 2) Indeks Theil. Indeks Theil juga salah satu dari alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah. PDRB per kapita dan jumlah penduduk pada tiap wilayah merupakan data yang dibutuhkan dalam mencari Indeks Theil. Nilai Indeks Theil memiliki rentang antara 0- 1, ini memiliki arti bahwa saat nilai Indeks Theil mendekati 1 (satu), maka tingkat ketimpangan didaerah tersebut semakin tinggi. Begitu sebaliknya saat nilai Indeks Theil mendekati 0 (nol), maka tingkat ketimpangan didaerah tersebut semakin rendah.
- 3) Konsep PDRB per Kapita Relatif Konsep PDRB per Kapita Relatif juga dapat dilakukan dengan menggunakan untuk menghitung tingkat ketimpangan.<sup>11</sup>
- 4) Regional Income Disparities. Jeffrey G. Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Williamson menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

## 5. Ketimpangan Pembangunan Dalam Ekonomi Islam

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Mustafa E Nasution menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.<sup>38</sup>

Sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Ada tiga instrumen dalam mengurangi perbedaan kekayaan masyarakat, yaitu:<sup>39</sup>

Parameter Positif atau wajib (Positive Measure) yang terdiri atas zakat dan faraid (waris). Parameter ini untuk menjamin aliran minimal kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang kurang mampu. Dimana parameter

---

<sup>38</sup> Laily Dwi Arsyianti and Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Rajawali Pers, 2017).

<sup>39</sup> Ibid.

positif adalah parameter yang memerintahkan seorang muslim yang memiliki harta yang lebih untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Meskipun anjuran tersebut ditujukan kepada orang yang kaya akan tetapi tolong menolong kepada oranglain dalam hal kebaikan juga dianjurkan untuk semua muslim. Karena dengan memberikan sebagian harta kita kepada oranglain itu berarti telah membersihkan harta kita dari hal yang tidak baik (bathil).

Parameter Sukarela (Voluntary Measure) yang terdiri dari infaq, sedekah dan wakaf. Instrumen ini mampu mendorong lebih terdistribusinya aset dan kekayaan dimasyarakat sehingga (Voluntary Measure) bisa menjadi alternatif pendanaan pembangunan daerah. Maksud dari parameter sukarela adalah ajuran dalam Islam mendistribusikan harta yang kita miliki yaitu dengan cara berinfaq, bersedekah, dan waqaf. Dalam Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian harta sehingga perputaran harta tersebut tidak hanya pada segelintir orang saja. Adanya pendistribusian tersebut selain kita bisa membantu oranglain dengan niat beribadah mencapai ridha Allah SWT, pendistribusian harta juga bisa membantu laju pertumbuhan perekonomian dalam kegiatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Parameter Larangan (Prohibitive Measure) yang terdiri dari larangan riba dan kezaliman ekonomi. Instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah praktik-praktik kezaliman ekonomi, seperti penipuan, riba dan penimbunan. Instrumen ini dapat menyebabkan distorsi dan ketidakseimbangan pasar, sehingga membahayakan stabilitas perekonomian. Akibatnya, peta kekayaan akan menunjukkan konsentrasi pada golongan tertentu dan menciptakan jurang kesenjangan yang semakin dalam dan melebar.



Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak sekali ayat Al-Quran dan al-Hadits yang memerintahkan manusia menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan. Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Hasyr: 7)

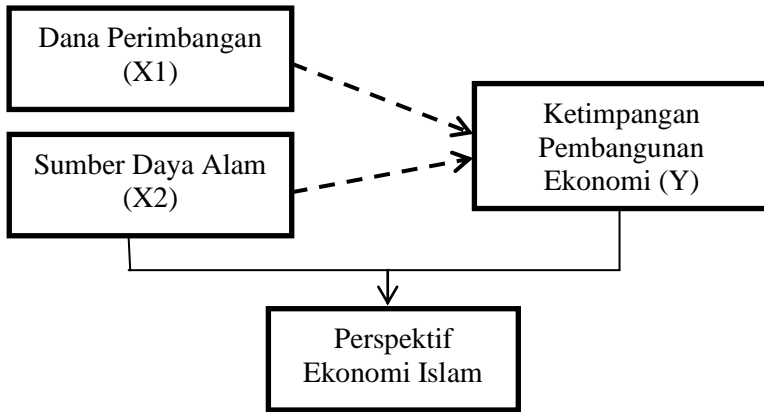
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

#### D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan, variabel yang akan diteliti adalah pertumbuhan ekonomi sebagai objek utama penelitian ini dan juga sebagai variabel dependen. Dan variabel lainnya sebagai variabel

independent.



**Gambar 2.1**

Kerangka Penelitian

Keterangan :

- - - - ->: Hubungan variabel secara parsial

————>: Hubungan variabel secara simultan

Kerangka pemikiran diatas dimaksudkan untuk menjelaskan mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu dana perimbangan dan sumber daya alam terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi seperti pengenalan Masalah, pencarian Informasi, evaluasi berbagai alternative, dan perilaku pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Al-Qur'an dan Hadist).

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:<sup>40</sup>

### 1. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>41</sup>

Meningkatnya penerimaan daerah melalui pemberian dana perimbangan dan pengumpulan dana non perimbangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan meningkatkan kapital stok daerah dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>42</sup>

Menurut Nordiawan, dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak Pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.71

<sup>41</sup> Kuncoro, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*.

<sup>42</sup> Novya Muharrika Izzah Rifai, "Analisis Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanuddin, 2022).

<sup>43</sup> Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, and Efda Kristinawati, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur," *Jurnal Aplikasi Bisnis* (2017): 43–59.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wanti Oktaviani, Zulgani, Rosmeli (2022) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Berdasarkan penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Lampung.<sup>44</sup>

H1: Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Lampung.<sup>45</sup>

## 2. Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2017-2022

Sumber daya alam merupakan bahan dasar penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan eksploitasi yang berskala besar terhadap sumber daya alam telah merusak dan mendegradasi sumber daya dasar.

Menurut Qur'an menyatakan bahwa, sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan penopang system kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan berdampak besar bagi kehidupan

---

<sup>44</sup> Wanti Oktaviani, Zulgani Zulgani, and Rosmeli Rosmeli, "Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Jambi," *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 6, no. 3 (2017): 105–112.

<sup>45</sup> Heniwati Gulo, Fitrawaty Fitrawaty, and Arwansyah Arwansyah, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 59–73.

mahluk di bumi terutama manusia yang populasinya semakin besar, sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik, merupakan kekayaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.<sup>46</sup>

Aktivitas pembangunan ekonomi tidak terlepas dari penggunaan sumber daya alam sebagai modal utama dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Etik Umiyati ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera mempunyai tingkat keragaman yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan setiap Propinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki oleh Propinsi tersebut. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar wilayah semakin besar.

Dengan menggunakan Indeks Williamson diperoleh Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Riau mempunyai angka indeks yang relative tinggi jika dibandingkan dengan Propinsi lainnya. Sementara untuk wilayah propinsi lainnya angka ketimpangan pembangunan relative merata<sup>47</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Diduga Sumber Daya Alam (SDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Lampung

---

<sup>46</sup> Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96.

<sup>47</sup> Etik Umiyati, "Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 9, No. 2 (2014): 2–3.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustria, Anggini Yulanda. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyasa Sya'iyah (Studi Di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Andiaskiton, Mario. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Smart* 3, no. 2 (2019): 68–80.
- Anggara, Sahya, and Ii Sumantri. "Administrasi Pembangunan: Teori Dan Praktik" (2016).
- Arsyianti, Laily Dwi, and Irfan Syaui Beik. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers, 2017.
- Bakri, Bakri, Syafrizal Syafrizal, and Hasdi Aimon. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Dan Kebijakan Penanggulannya." *Jurnal Kajian Ekonomi* 4, no. 7 (2016).
- Beik, Irfan Syaui, and Laily Dwi Arsyianti. "Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi." *Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan ke-1* (2016).
- Budiantoro, Hartono. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah." *Semarang: Universitas Diponegoro* (2008).
- Chandra, Dodi, Syurya Hidayat, and Rosmeli Rosmeli. "Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Daerah Di Provinsi Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 12, no. 2 (2017): 67–76.
- Eksandy, Arry, Mohamad Zulman Hakim, and Ekawati Ekawati. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 12, no. 2 (2017): 67–76.

- Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2019): 85–94.
- Fauzi, A. “Peran Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan” (2010).
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan: Teori Dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Gulo, Heniwati, Fitrawaty Fitrawaty, and Arwansyah Arwansyah. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara.” *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 59–73.
- Hidayat, Muhammad, and Sitti Rahayu. “Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau; Pendekatan Regresi Kuadratik.” *Agregate* 1, no. 1 (2018): 14–22.
- Hunker, Jeffrey, and Christian W Probst. “Insiders and Insider Threats-An Overview of Definitions and Mitigation Techniques.” *J. Wirel. Mob. Networks Ubiquitous Comput. Dependable Appl.* 2, no. 1 (2011): 4–27.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang.” *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* (2004).
- Irawan, Rismanto, and Deden Dinar Iskandar. “Analysis Of Infrastructure Effect On Indonesia’s Economic Growth Year 2007-2014.” *AFEBI Economic and Finance Review* 4, no. 2 (2019): 121–130.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga, 2014.
- Mahardiki, Doni, and Rokhedi Priyo Santoso. “Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia 2006-2011.” *JEJAK* 6, no. 2 (2013).
- Manduapessy, Rulan L. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika.” *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)* 4, no. 2 (2020): 39–57.

- Meyresta, Lovina, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96.
- Nova, Alfira Rama. "Analisis Atas Ketimpangan Pembangunan Dan Pengujian Hipotesis Kuznet Di Provinsi Banten Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19." Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.
- Nurdiwaty, Diah, Badrus Zaman, and Efda Kristinawati. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur." *Jurnal Aplikasi Bisnis* (2017): 43–59.
- Oktaviani, Wanti, Zulgani Zulgani, and Rosmeli Rosmeli. "Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Jambi." *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 6, no. 3 (2017): 105–112.
- Prawoto, Nano, and Agus Tri Basuki. "Penyusunan Indikator Dan Pemetaan Kantong Kemiskinan Di Yogyakarta: Pendekatan Sistem Informasi Geografi." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 16, no. 2 (2015): 220–232.
- primadha Santosa, Dico. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung)" (2022).
- Prio, Prasojo. "Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Lampung: Ekonomi Dan Regional (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2021)" (2016): 1–23.
- Putri, Ni Kadek Novia Indrawati, and Ni Putu Ayu Darmayanti. "Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 5 (2019): 2834.



- Rasyid, Imam Muhammad. "Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyur Bi Tafsir Al-Manar Jilid 1" (2016).
- Rifai, Novya Muharrika Izzah. "Analisis Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Saad, Muh, Ayu Rukayyah Yunus, and Muslihati Muslihati. "Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 131–146.
- Santosa, Siswoyo Hari. "Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur." *Media Trend* 10, no. 2 (2015): 138–155.
- Sari, Rosita. "Pemodelan Regresi Data Panel Random Effect Dengan Metode Generalized Least Square (GLS)" (2021).
- Wakhid, Ali Abdul, and A A W M SiAg. "Buku Administrasi Dan Pembangunan Nasional Oleh Dr. Ali Abdul Wakhid, S. Ag., M. Si." Harakindo Publishing, Sukarame Bandar Lampung, 2016.
- Widia, Lestari. "Ketimpangan Pembangunan Di Nagari Berprestasi (Studi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Jorong Koto Tuo, Nagari Simarasok, Kec. Baso, Kab. Agam)." Universitas Andalas, 2013.
- Zaini, Ahmad. "Pengaruh Kekayaan Sumberdaya Alam Batubara Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Borneo Administrator* 13, no. 2 (2017): 111–130.
- Zul Hazmi Alfurqani, Dwi Widiarsih, and Jeki Alagusri. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau." *Economics, Accounting and Business Journal* 1, no. 1 (2021): 295–307.